



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

*

*

*

**

**

*

*

*

JAKARTA 2024



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
29 FEBRUARI s.d. 4 MARET 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun 2023-2024 ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meninjau dan menghimpun informasi terkait dengan permasalahan bidang pertanian dan pangan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun dasar hukum dari kunjungan kerja ini mengacu pada:

1. Peraturan Dewan Perwakilan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Februari 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 6 Maret 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan informasi dari pemerintah daerah dan mitra kerja Komisi IV DPR RI terkait dengan permasalahan ketersediaan, pasokan, dan harga pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Melakukan peninjauan lapangan dan berdiskusi dengan stakeholder terkait dengan permasalahan dan pengembangan dan potensi ekspor buah buahan, khususnya durian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Meninjau pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Meninjau keberlangsungan ekosistem karst sehubungan dengan pengembangan ekowisata di Kabupaten Gunungkidul.

C. RUANG LINGKUP

Sasaran kunjungan kerja Komisi IV DPR RI meliputi bidang pertanian dan pangan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun 2023-2024 ke Provinsi DIY dipimpin oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan diikuti oleh para anggota Komisi IV DPR RI.

E. LOKASI DAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun 2023-2024 ke Provinsi DIY dilaksanakan pada tanggal 29 Februari - 4 Maret 2024. Adapun lokasi kunjungan adalah sebagai berikut:

1. Kampung Durian, Desa Nglanggeran, Kec. Patuk, Kabupaten Gunungkidul;
2. Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul;
3. *HeHa Ocean View*, Girikarto, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul;
4. Gudang Beras Bulog Sendangsari, Kec. Pajangan, Kabupaten Bantul.

II. GAMBARAN UMUM

A. KONDISI KETERSEDIAAN PANGAN DAN PERTANIAN DI PROVINSI D. I. YOGYAKARTA

Akhir-akhir ini kenaikan harga beras terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kenaikan harga beras yang dimulai terjadi bulan September 2022, ternyata sampai dengan Februari 2024 terus mengalami kenaikan.

Awal tahun 2024 kita dihentak dengan kenaikan harga beberapa komoditas

pangan pokok kita dengan kenaikan harga yang tinggi, yang dalam istilah Pemerintah adalah berada pada harga stabil tinggi. Harga beras premium mengalami kenaikan lebih dari Rp2,500,00 per kilogram. Sementara itu kenaikan beras medium yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat kecil mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan beras premium, yaitu sebesar Rp3.500,00/kilogram.

Komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi lainnya adalah cabe rawit merah. Berdasarkan Harga Acuan Pemerintahnya (HAP) adalah Rp40.000,00- Rp57.000,00 per kilogram dan naik menjadi rerata Rp68.100,00/kilogram. Cabe merah kriting dari antara Rp37.000,00 – Rp57.000,00 menjadi Rp70.500,00 per kilogram. Jagung dari harga Rp5.000,00 menjadi Rp9.094,00 per kilogram. Kedele dari harga Rp12.000,00 menjadi Rp13.482,00 per kilogram.

Berbagai media elektronik menyebutkan bahwa masyarakat di berbagai wilayah mengeluhkan harga beras medium dan premium mengalami peningkatan harga, khususnya di DIY.

Harga beras premium dan medium hampir di seluruh provinsi di Indonesia berada di atas Harga Eceran Tertinggi. Harga tersebut berdasarkan acuan dari Pemerintah, maka tingkat harga yang terjadi di tingkat konsumen seluruhnya memerlukan intervensi Pemerintah. Hal tersebut juga berdampak pada ketersediaan beras di beberapa lokasi mengalami keterbatasan. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga telah mengupayakan berbagai kegiatan untuk menekan dan mengendalikan harga, baik dari kegiatan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar), menyalurkan bantuan pangan, hingga melakukan operasi pasar.

B. KAMPUNG DURIAN NGELANGGERAN KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Buah durian merupakan salah satu jenis buah lokal asli Indonesia dengan sebaran yang sangat luas, mulai dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Saat ini menurut data lebih dari 120 varietas durian lokal unggul yang telah dilepas, akan tetapi pamornya seringkali kalah dengan durian negara seperti Thailand dengan Montongnya dan Malaysia dengan Musangkingnya, padahal jika dibandingkan dari rasa dan kualitas buahnya, durian lokal asli Indonesia memiliki cita rasa yang tak kalah dari durian impor. Kemampuan untuk

menyediakan buah durian sepanjang tahun secara alami sebetulnya saat ini sudah dapat dilakukan oleh petani kita, akan tetapi pemahaman petani untuk menghasilkan durian dari benih yang unggul dan dibudidayakan dengan baik dan dipanen dengan standar teknisnya masih merupakan salah satu kendala dalam mempersaingkan buah durian lokal dengan buah durian impor.

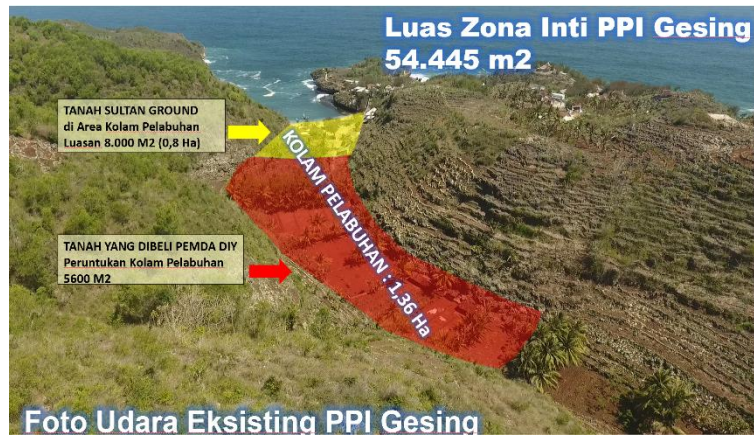
C. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI GESING

Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing merupakan tidak lanjut dari visi dan misi Gubernur DIY tahun 2012-2017, 2017-2022, dan 2022-2027. Pembangunan PPP Gesing dimaksudkan untuk menjadikan laut selatan sebagai pintu muka DIY sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan tangkapan ikan nelayan DIY yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa potensi wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 573 yakni dari ujung barat Jawa hingga Nusa Tenggara Timur (NTT), potensi sumber daya kelautan dan perikananannya hampir mencapai 1 juta ton per tahun, sedangkan nelayan DIY baru bisa menangkap sekitar 6.500 ton sumber daya laut tiap tahunnya.

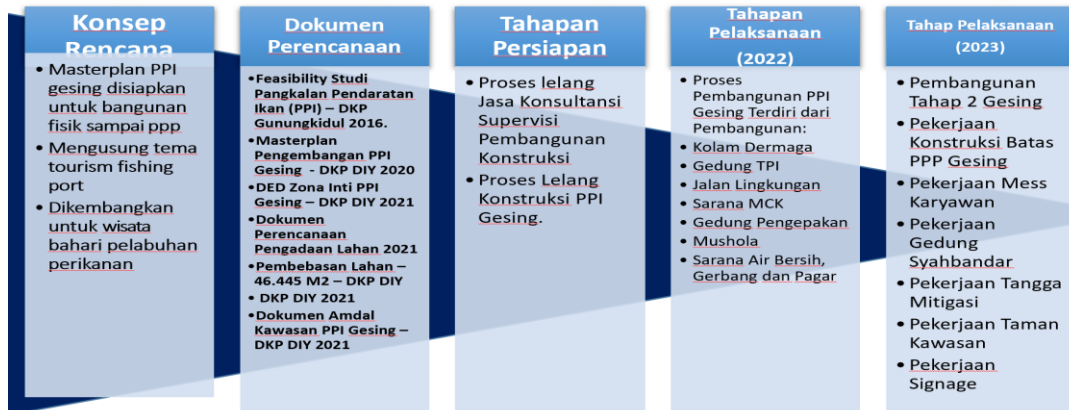
Pembiayaan pembangunan pelabuhan 100 persen berasal dari dana keistimewaan DIY diproyeksikan untuk menggantikan fungsi Pelabuhan Tanjung Adikerto yang mangkrak bertahun-tahun akibat sedimentasi. Lokasi PPP Gesing di ujung teluk terdapat dua bukit yang berfungsi sebagai penahan gelombang alami. Teluk Gesing menghadap sisi tenggara Samudera Hindia sehingga gelombang yang masuk tidak langsung ke pantai. Sedimen dasar yang ada di perairan Gesing dikategorikan rendah sehingga potensi penutupan alur pelayaran di pintu masuk akibat sedimentasi kecil, sehingga biaya pemeliharaan Kolam Pelabuhan dan Alur Pelayaran Rendah.



Foto Pantai Gesing Sebelum Dibangun Pelabuhan



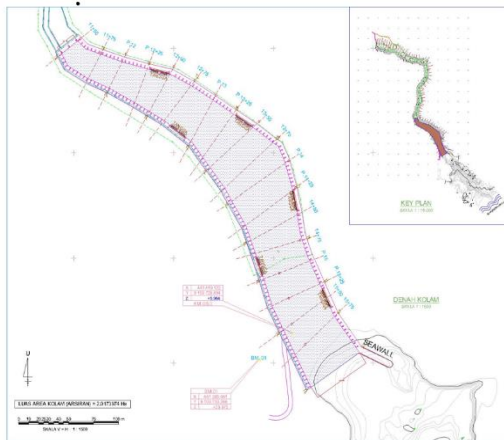
Progres Pengembangan PPI Gesing



Anggaran Pembangunan PPP Gesing :

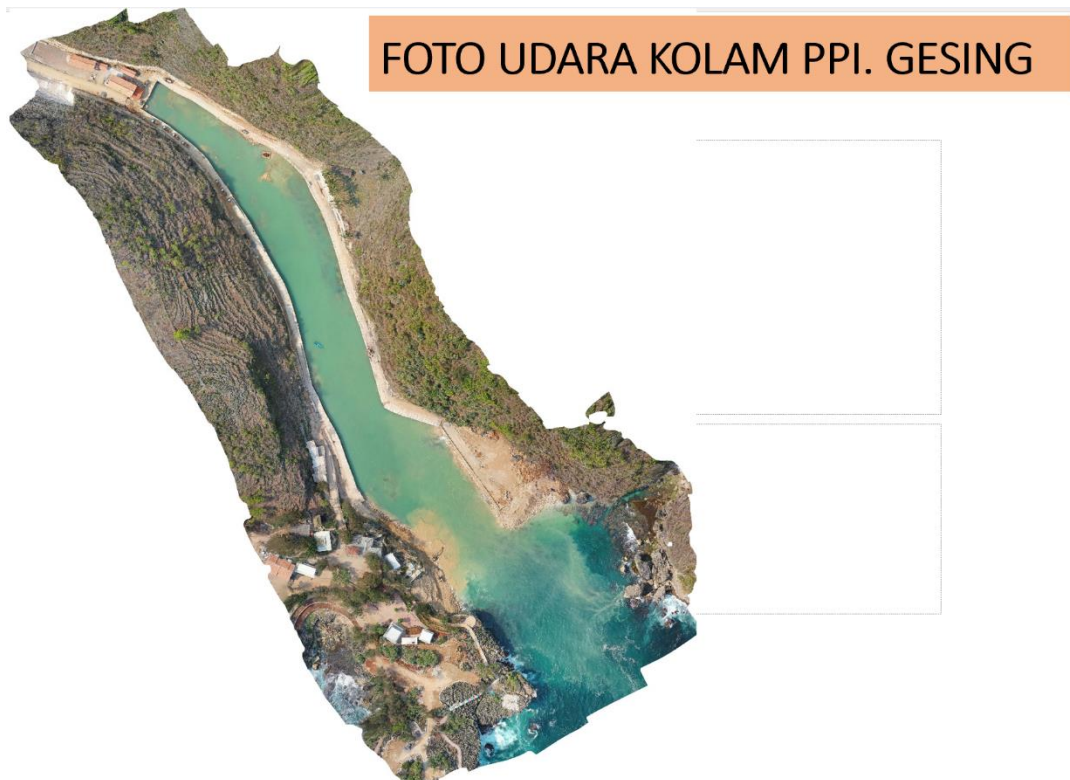
- 2021 – Pembebasan Lahan : Rp. 25.245.220.000,-
 - 2022 – Pembangunan Tahap 1 : Rp. 108.602.707.000,-
 - 2023 – Pembangunan Tahap 2 : Rp. 15.381.853.000,-
- } Rp. 149.229.780.000,-

Analisis Pengelolaan PPI Gesing :



Gambaran umum situasi rencana kolam dermaga/pelabuhan

- Panjang dermaga 700 m, lebar sisi utara 20,00 m dan lebar sisi selatan 59,00 m. Luas Kolam 1,36 hektar.
- Kolam Dermaga diperuntukkan Bagi Perahu Motor Tempel dan Kapal Motor Sampai Dengan 30 GT
- Daya Tampung Kolam :
Kapal 10 – 30 GT : 40 Kapal
PMT : 50 Unit
- Kapasitas Produksi :
PMT : 1600 Ton Per Tahun
Kapal 10 – 30 GT : 4320 ton Per Tahun
- Estimasi Nilai Produksi : 5920 Ton x Rp. 15.000,- =Rp. 88.800.000.000,-/Tahun
- Jarak PPI Gesing Ke JJLS terdekat : 9 Km
- Jarak PPI Gesing Ke Bandara YIA : 60 km (Via JJLS)
- Jarak PPI Gesing Ke Pusat Kota Yogyakarta : 40 km
- Jumlah Nelayan (PMT) Lokal Saat ini : 40 Orang
- Jumlah KUB Perikanan Tangkap Eksisting : 2 KUB
- Jumlah PMT Saat ini : 25 Unit
- Jumlah Kapal Motor 16 GT : 2 Unit



D. EKOSISTEM KARST GUNUNG SEWU

Indonesia memiliki bentang alam karst yang bercirikan tropik yang khas dan unik di dunia, kawasan karst yang membentang di Pulau Jawa terutama di bagian selatan disebut karst Gunungsewu. Karst Gunungsewu merupakan aset bertaraf internasional berdasarkan tipologi karst (holokarst-tropik) dan kelas karst (kelas i, ii). Di sisi lain terdapat keunikan landscape bukit, lembah purba, sungai bawah tanah, potensi sumber daya. Gunungsewu juga sebagai karst tropik-tebal yang unik-spektakuler yang berkembang baik dan potensial untuk monumen alam, museum karst, showroom karst, dan pusat informasi karst.

Karst adalah suatu bentang alam yang secara khusus berkembang terutama pada batuan karbonat sebagai akibat proses pelarutan. Kawasan karst merupakan ekosistem yang unik ditinjau dari aspek fisik, biotik, dan sosial masyarakatnya. Keunikan bentang alam karst ditandai oleh ciri-ciri spesifik yang ada di permukaan (eksokarst), seperti dolin, uvala, polye, lembah kering, telaga karst, pola aliran yang masuk dalam tanah dan ciri-ciri fisik bawah permukaan (endokarst) seperti sungai bawah tanah. Karst Gunungsewu secara geologis geomorfologi berumur tersier, berada di zona selatan Jawa yang berbatasan dengan laut Samudera Hindia yang membentang dari daerah Bantul,

Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan.



Gambar pola sebaran geopark gunungsewu membentang dari Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan (Sumber: Suratman, 2019).

Keunikan flora dan fauna di kawasan karst, baik yang hidup di ekosistem eksokarst maupun endokarst penciri tanaman seperti ketela, jambu mete, sirsat, srikaya, pohon jati. Demikian juga hewan seperti ular kobra, kelelawar, betet, landak, kera ekor panjang. Prospek pengembangan ekosistem karst dapat dimanfaatkan potensinya untuk pembangunan pariwisata, pendidikan, kehutanan, perkebunan, lingkungan, dan jasa.

III. HASIL KUNJUNGAN

A. KAMPUNG DURIAN, DESA NGLANGGERAN, KEC. PATUK, KAB. GUNUNGKIDUL

1. Penjelasan Pemerintah

Pada saat ini nilai pasar dunia sekitar 54 triliun rupiah dan kecenderungannya permintaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data, pasokan terbesar durian dipenuhi oleh Thaliand dan Malaysia dengan jumlah pasokan lebih dari 80 persen, sisanya disuplai dari negara lain seperti Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Durian merupakan asli buah Indonesia, hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki jenis-jenis durian yang memiliki rasa dan aroma yang tidak kalah

dengan durian dari negara lainnya. Pada saat ini Pemerintah telah melepas sebanyak 114 varietas durian unggul dari berbagai daerah.

Dari hasil FGD dengan beberapa stakeholder ditetapkan durian unggulan nusantara yang akan dikembangkan ada 8 jenis, yaitu: Malika, Simemang, Klamunod, Pelangi Atururi (sudah dilepas). Selain itu ada durian unggulan yang dalam proses pendaftaran yaitu Mas Ajay, Siblih, Plakin, dan Sinku. Dalam upaya untuk mengembangkan tanaman durian sebagai salah satu buah unggulan nasional, telah dikembangkan pertanaman durian melalui kegiatan pengembangan Kampung Durian. Jumlah kampung yang telah dikembangkan melalui APBN 2020-2023 adalah 364 kampung.

Produksi durian berdasarkan ASEM 2023: 1.839.588 ton dengan LP 246.454 ha (produktivitas: 7,46 ton/ha).

Dinamika harga durian premium:

- a. 3 tahun lalu seperti Kromo Banyumas (Bawor) dan Montong masih Rp150.000,00/kg, sekarang Rp80.000,00/kg, Harga durian lokal: Rp10.000,00 -Rp50.000,00 per buah.
- b. Adanya teknologi *Top Working*, yaitu menyatukan tanaman unggul dengan tanaman asli untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik, petani sudah mulai dilakukan petani dengan cara meyabungkan bagian tanaman unggul dengan durian premium seperti dengan Kromo Banyumas (Bawor), Simemang, MK Hortimart, cara ini adalah salah satu cara memperbaiki kualitas tanaman durian lokal.
- c. Meskipun sudah ada 114 durian yang dilepas, namun beberapa PIT sudah mati atau masih ada tetapi sudah sangat tua dan belum dikembangkan menjadi BF maupun BPMT, sehingga sulit mendapatkan mata entres yang cukup.
- d. Permasalahan umum dalam pengembangan durian adalah:
 - 1) belum tersedianya sumber air yang menjamin tersedianya air sepanjang tahun;
 - 2) sebagian kebun durian belum dibudidayakan secara intensif;
 - 3) Harga pupuk yang tinggi;
 - 4) Belum ada pengolahan limbah kulit durian untuk menjadi pupuk organik;

- 5) Durian jenis baru seperti Klamunod (Super Tembaga) belum banyak dikembangkan baru terbatas di Bangka Barat, sehingga harga masih sangat tinggi: Rp800.000,00 - Rp1.000.000,00/kg dan setiap buah yang ada di pohon sudah dipesan.

2. Tanggapan DPR

- a. Dalam pengembangan durian hendaknya melibatkan generasi muda yang mulai tertarik dengan usaha di bidang pertanian. Terutama dalam pengembangan sektor hilirnya. Pengolahan durian menjadi produk-produk makanan lain, diharapkan dapat menekan turunnya harga durian di tingkat petani pada saat panen raya;
- b. Pengembangan durian juga diharapkan mampu mengisi permintaan pasar durian dunia yang terus bertumbuh dan dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan petani dan devisa negara;
- c. Untuk pengembangan durian diharapkan pemerintah mampu menyediakan benih tanaman durian unggul di berbagai daerah dengan membangun kebun-kebun sumber benih dan menetapkan lebih banyak pohon induk terpilih, untuk melaksanakan hal tersebut diharapkan Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku dan memperluas pemberian subsidi input (pupuk dan pestisida) bagi para petaninya;
- d. Negara diharapkan mampu hadir dalam mewadahi kreativitas anak-anak muda atau petani milenial yang seringkali memiliki cara berpikir yang *out of the box*, dalam pengembangan durian yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

B. PENINJAUAN KE PPP GESING GUNUNGKIDUL

1. Tanggapan Pemerintah

- a. Pembangunan PPP Gesing saat ini masih berjalan dan ditargetkan selesai pada tahun 2024 ini. Pembangunan sempat molor dikarenakan adanya kondisi kahar yaitu munculnya air tawar di beberapa titik Pelabuhan dan lapisan tanah keras yang tidak bisa dihancurkan dengan proses mekanik.
- b. Pembangunan sarana pendukung Pelabuhan berupa Gedung TPI, Gedung Perbekalan, Shelter nelayan, musholah, dan lain-lain telah

selesai di bangun.

- c. Sudah banyak nelayan dari luar DIY yang ingin masuk ke PPP Gesing namun Pemerintah DIY berencana membatasi kapal-kapal yang berlabuh di PPP Gesing untuk melindungi nelayan lokal.
- d. Pemerintah DIY bermaksud mengajukan permohonan kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan berupa program-program untuk mendukung operasional PPP Gesing, antara lain Kampung Nelayan Modern, Fasilitas *Cold Storage*, dan lain-lain.
- e. Pemerintah DIY berencana meningkatkan kapasitas nelayan lokal dan menambah kapal-kapal di atas 15 Gross Ton yang dikelola oleh nelayan lokal.

2. Tanggapan DPR

- a. Komisi IV DPR RI mengapresiasi dan mendukung Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantan (PPP) Gesing di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pelabuhan perikanan pantai dengan konsep memadukan dengan kegiatan wisata. Kondisi ini diharapkan dapat juga memicu perkembangan wisata di daerah tersebut;
- b. Pembangunan PPP tersebut dapat meningkatkan pendapat nelayan kecil dan sekaligus mewujudkan visi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya;
- c. DPR merekomendasikan bahwa pelayanan dari PPP Gesing adalah memrioritaskan pelayanan terhadap nelayan kecil.

C. KUNJUNGAN KE EKOSISTEM KARST DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

1. Penjelasan Pemerintah

- a. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul berada di dalam ekosistem karst, sehingga Pemerintah Daerah Gunungkidul mengalami kendala apabila ada investor yang mau berinvestasi karena harus memiliki dokumen lingkungan berupa Amdal.
- b. Penetapan Kawasan Ekosistem Karst dibagi menjadi dua, yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya.



- Semua kegiatan atau usaha yang berada di dalam Kawasan lindung bentang alam karst wajib memiliki dokumen amdal.
- Kewajiban Amdal tersebut dapat dikecualikan oleh Pengampu Kawasan Lindung.
- Perlu diidentifikasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilarang dan diperbolehkan dalam kawasan lindung tersebut.
- Apabila rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut diperbolehkan, maka pengelolaan dan pemantauan lingkungannya harus memuat kewajiban terhadap perlindungan kawasan lindung karst sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah Gunungkidul berkomitmen untuk melindungi lingkungan hidup dan masyarakat lokal yang terdampak dari pembangunan atau investasi oleh pihak swasta.

2. Tanggapan DPR

- Perlu adanya kajian mendalam terkait dengan dampak lingkungan dan adanya potensi bencana yang diakibatkan oleh investasi untuk pengembangan wisata di ekosistem kawasan bentangan alam karst (KBAK Gunungkidul). Sehubungan dengan banyaknya minat para investor swasta untuk berinvestasi di bidang pariwisata di Gunungkidul.
- Perlu diperhatikan dampak terhadap masyarakat dengan adanya

pengembangan area wisata di kawasan tersebut sehingga masyarakat juga bisa memperoleh manfaat ekonomis dari perubahan ekosistem dan agar diupayakan perubahan ekosistem tersebut tidak menambah resiko bahaya bagi masyarakat dan wisatawan yang datang ke tempat tersebut.

- c. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang ekosistem Karst oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjaga kesinambungan lingkungan dan kehutanan yang sangat penting.
- d. Ke depan agar ada pembagian wilayah kerja dan tanggung jawab yang lebih jelas terhadap keberlangsungan ekosistem KBAK yang masih dipergunakan terutama terkait dengan izin-izinnya.
- e. Investasi yang masuk pada dasarnya diupayakan untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap kerusakan alam dan ekosistemnya sehingga perlu dengan cermat dihitung daya dukung masing-masing lingkungan. Hal tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini juga dihubungkan dengan penetapan ekosistem Karst Gunungkidul oleh UNESCO sebagai salah satu geopark dunia.
- f. Pelaku usaha perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur pelaku usaha harus memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh Amdal dan NIB.

D. KUNJUNGAN KE GUDANG BULOG BANTUL

1. Tanggapan Pemerintah

- a. Stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang berada di Bulog Sebesar 1,3 juta ton. Dengan kondisi tersebut maka cadangan beras pemerintah berada pada kondisi yang aman;
- b. Persetujuan Impor (PI) sejumlah 2 Juta ton telah terealisasi 100% yang dilaksanakan secara bertahap dalam 8 kali tahapan kontrak dengan importir yang dilaksanakan sejak bulan Maret s.d. September 2023;
- c. Persetujuan Impor (PI) sejumlah 1,5 juta ton telah terealisasi 60% yang dilaksanakan secara bertahap dalam 3 kali tahapan kontrak dengan

importir yang dilaksanakan sejak Oktober s.d. Desember 2023.

- d. *Carry Over* Persetujuan Impor (PI) sejumlah 600 ribu ton pada tahun 2023 telah teralisasi 50,13%, atau sejumlah 300,78 ribu ton. Sisa *Carry Over* PI 2023 adalah sejumlah 299,22 ribu ton.
- e. Persetujuan Impor (PI) tahun 2024 sejumlah 2 juta ton telah terkontrak sejumlah 500 ribu ton, atau 33,33% dengan realisasi penguasaan beras impor sebesar 364,78 ribu ton.
- f. Realisasi SPHP/operasi pasar pada tanun 2020 berturut-turut sampai dengan bulan Februari 2024 adalah: 1.027.023 ton tahun 2020, 767.869 ton tahun 2021, 1.261,225 ton tahun 2022, 1.196 ton tanun 2023 dan 323.005 ton tahun 2024.
- g. Tujuan bantuan pangan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran sebagian kebutuhan pangan beras, periode pemberian bantuan dari Januari 2024 sampai dengan Juni 2024, jumlah sasaran yang **duterpa** oleh bantuan adalah sebesar 22.004.077 KPM sesuai dengan data dari Kemenko PMK, setiap KPM menerima bantuan sebesar 10 kg per bulan per KPM dengan kualitas beras CBP medium. Bantuan dialokasikan dari dana Bapanas dan Kemenkeu.
- h. Bulog belum bisa melakukan pengadaan beras dari sumber beras di dalam negeri, Penyebab pertama adalah harga GKG di tingkat petani masih jauh di atas HPP yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu terjadi keterlambatan masa panen. Panen baru akan terjadi di bulan April.

2. Tanggapan DPR

- a. Menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, Komisi IV DPR RI meminta pemerintah agar lebih memperhatikan pendistribusian pasokan beras Bulog ke pasar-pasar tradisional. DPR juga mendorong agar pendistribusian beras dilakukan secara merata.
- b. Operasi pasar jangan hanya dilakukan di pasar modern jika ingin harga beras turun. Operasi pasar dilakukan juga dilakukan di pasar tradisional.
- c. Pemerintah harus berani menaikkan HPP gabah kering giling meski dampaknya akan terjadi inflasi.
- d. Dalam upaya menurunkan harga beras, maka pemerintah harus banyak

- melakukan operasi pasar beras murah.
- e. Pemerintah agar tidak melakukan impor pada saat tibanya panen di dalam negeri, karena dikhawatirkan akan menekan harga gabah di tingkat petani.
 - f. Operasi pasar direkomendasikan tidak dilakukan pada sentra penghasil padi yang tengah panen.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI meminta atensi Bapanas dan Perum Bulog untuk membenahi tata kelola perberasan nasional yang ditengarai sebagai salah satu penyebab naiknya harga beras.
2. Komisi IV DPR RI juga meminta perhitungan kebutuhan pangan dihitung secara cermat dan disampaikan secara benar agar kebutuhan pangan dapat hitung secara cermat. Data tentang kebutuhan pangan tersebut dijadikan acuan oleh pemerintah dalam melakukan manajemen produksi dan manajemen stok yang harus dilakukan pemerintah.
3. Pemerintah perlu membuat kajian yang komprehensif terkait dengan dasar dilakukan impor beras terkait dengan ketersediaan, tata niaga, dan distribusi pangan yang ditengarai menjadi salah satu penyebab peningkatan harga beras
4. Dalam pengembangan kawasan wisata agro maupun wisata ekosistem, DPR meminta pemerintah untuk memperhatikan dampak kerusakan lingkungan dan resiko bencana yang dihadapinya.
5. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah Daerah Gunungkidul dalam pengembangan PPP Gesing dan meminta pengelolaan PPP Gesing memrioritaskan nelayan-nelayan lokal yang berlabuh di PPP Gesing.
6. Dalam pengembangan komoditas pertanian pemerintah agar memperhatikan peluang dan potensi pasarnya.
7. Pembangunan sarana dan infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi dan pendapat petani atau nelayan diharapkan dilakukan secara terukur dan hati-hati agar memperoleh manfaat yang maksimal.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke D.I. Yogyakarta pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak dalam

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya masyarakat D.I. Yogyakarta.

Jakarta, Maret 2024

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin, S.E.

FOTO-FOTO





LIPUTAN MEDIA

- <https://www.wartahandayani.com/2024/03/kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri.html>
- <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/02/negara-perlu-mewadahi-kreativitas-petani-milenial-dalam-pengembangan-buah-durian-di-gunungkidul/>
- <https://www.wartahandayani.com/2024/03/komisi-iv-dpr-ri-dalam-kunjungan.html>
- <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/02/pembangunan-ppp-gesing-gunungkidul-diharapkan-mampu-tingkatkan-kesejahteraan-nelayan/>
- <https://kkp.go.id/stasiunkipmyogyakarta/artikel/60931-bppmhkp-yogyakarta-dampingi-kunjungan-kerja-reses-komisi-iv-dpr-ri-di-ppp-gesing-gunungkidul>
- <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/03/pemerintah-diminta-pastikan-beras-bulog-terdistribusi-merata-guna-menekan-kenaikan-harga/>
- <https://www.indopos.co.id/ekonomi/2024/03/04/ketua-komisi-iv-dpr-minta-pemerintah-pastikan-beras-bulog-terdistribusi-merata/>
- <https://indoposco.id/ekonomi/2024/03/04/ketua-komisi-iv-dpr-minta-pemerintah-pastikan-beras-bulog-terdistribusi-merata>
- <https://emedia.dpr.go.id/2024/03/03/keberlangsungan-ekosistem-karst-terkait-potensi-wisata-di-gunungkidul-harus-dikaji-lebih-dalam/>